

214

DAMPAK KRISIS MONETER DAN EKONOMI TERHADAP KRIMINALITAS DI INDONESIA *)

Oleh Prof. Dr. TB. Ronny Nitibaskara

Yang terhormat

Bapak Kapolri, Bapak Dekan PTIK, Bapak Gubernur PTIK, Bapak Rektor Universitas Indonesia sebagai Pembina PTIK, Anggota Senat Akademik PTIK, Para Pejabat Teras Mabes Polri, Para Kapolda, Para Sesepuh Polri, Para Dosen, Saudara Para Wisudawan dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama perkenankanlah saya selaku pribadi maupun Guru Besar Magister Kepolisian UI menyampaikan selamat kepada para wisudawan PTIK yang hari ini dilantik sebagai Sarjana Ilmu Kepolisian. Semoga bekal-bekal akademik yang diperoleh selama menimba ilmu di PTIK kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara semua.

Kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan PTIK khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Awaloedin Djamin, M.P.A., atas kepercayaan dan kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah di dalam acara Wisuda dan Dies Natalis ke-52 PTIK dan wisuda Sarjana Program S-1 Ilmu Kepolisian. Pada hemat saya, tugas

yang diberikan kepada saya sesungguhnya tidaklah ringan, mengingat judul pidato yang ditentukan oleh Dekan PTIK cukup menantang, sekaligus "memprihatinkan" yaitu : Dampak Krisis Moneter dan Ekonomi Terhadap Gangguan Kamtibmas di Indonesia. Mengingat pengertian gangguan Kamtibmas cukup luas, maka saya ingin membatasi bentuk-bentuknya dan memfokuskan diri pada beberapa kasus kejahatan kekerasan, seperti pembunuhan, bunuh diri, kejahatan terhadap harta benda, dan sebagainya. Dengan demikian judul pidato saya rubah menjadi : Dampak Krisis Moneter dan Ekonomi terhadap Kriminalitas di Indonesia.

Hadirin yang terhormat,

Akhir-akhir ini gangguan Kamtibmas yang disinyalir secara kuantitatif semakin meningkat. Sebagai contoh kriminalitas yang terjadi di wilayah kerja Polda Sumatera Selatan. Kolonel (Pol) Ivan Sihombing, Kapolda merinci, selama triwulan III (Oktober, Desember 1997) jumlah tindak pidana (crime total) mencapai 2059 kasus. Sedang Triwulan IV meningkat sampai 2178 kejadian atau naik 5,77 persen. Sementara untuk tindak pidana menonjol naik 5,69 persen yang meliputi pencurian dengan pemberatan 679 kasus (22,02 persen),

*) Pidato Dies Natalis Ke-52 PTIK dan Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Angkatan XXXIII/ Wirapati Prasasta.

pencurian dengan kekerasan 279 kasus (11,60 persen), dan pencurian kendaraan bermotor 219 kasus (54,43 persen). Sementara itu, dari segi waktu tingkat kerawanan juga mengalami kenaikan yakni terdapat percepatan tiga menit lima puluh detik per kejahatan. Sedangkan tingkat terkena kejahatan per 100.000 penduduk meningkat 1,74 persen atau 32 orang. (Kompas, 1 Mei 1998).

Crime index per Polda, kalau dijumlahkan rata-rata juga mengalami kenaikan. Sebagai contoh curat periode Januari 1998 berjumlah 3571 kasus. Pada periode Februari naik menjadi 3687 kasus. Pada periode Maret meningkat lagi menjadi 4110 kasus. Curanmor pada periode Januari 1998 berjumlah 1658 kasus. Pada periode Februari 1998 turun menjadi 1658 kasus. Pada periode Maret naik lagi menjadi 1658 kasus. Curas pada periode Januari berjumlah 753 kasus. Pada periode Februari turun menjadi 697 kasus. Pada periode Maret naik lagi menjadi 788 kasus. Penganiayaan berat pada periode Januari 585 kasus. Pada periode Februari naik menjadi 643 kasus. Pada periode Maret naik lagi menjadi 700 kasus. Pembunuhan pada periode Januari 1998 berjumlah 133 kasus. Pada periode Februari turun menjadi 127 kasus. Sedangkan pada periode Maret turun lagi menjadi 106 kasus. (Data Mabes Polri) Crime index ini belum meliputi jenis kejahatan lainnya, seperti perkosaan, kenakalan remaja, narkoba dan sebagainya.

Sementara secara kualitatif kriminalitas juga kian menonjol. Hampir setiap hari kita membaca dan mendengar peristiwa pencurian yang berani, perampokan yang nekad, dan pembunuhan yang sadistik. Menanggapi peristiwa di atas, Prof. Dr. Dadang Hawari (1998) seorang psikiater mengatakan bahwa "Intensitas dan tingkat kriminalitas dewasa ini sudah melewati batas perikemanusiaan".

Memang sejak tiga tahun terakhir ini kejahatan kekerasan semakin sadistik dan sukar diterima oleh akal manusia yang sehat.

Masih belum hapus dari ingatan kita, pembantaian keluarga Herbin (1995), pembunuhan keluarga Rohadi (1995), Perkosaan terhadap keluarga Acan (1996), kini timbul pula serangkaian pembunuhan yang tak kurang brutal dan sadistik. Orang belum lupa bagaimana pasangan suami istri Endro Winarso dan Pratiwi terbunuh di rumahnya sendiri di Modern Land Tangerang akhir Februari silam.

Belum lagi misteri pembunuhan ini terungkap, terjadi lagi kasus pembantaian keji terhadap keluarga Suharman. Pegawai Dinas Pariwisata DKI Jakarta itu terbunuh bersama istrinya, serta anak bungsunya yang masih berusia dua tahun di Ciganjur Jakarta Selatan. Pelakunya ternyata bukan orang jauh : Jamluddin 20 th. tetangga sekaligus guru mengaji anak Suharman. Belum genap seminggu, lagi-lagi terjadi pembantaian sadistik terhadap pasangan suami istri Ali

Arsyad (40 th) dan istrinya Rosmawati (33 th) di Kampung Ciater, Rawakalong Bogor (Forum Keadilan, 1998). Kasus-kasus pembunuhan tersebut secara umum akan dicoba dianalisis dalam teori-teori yang melatar belakangi kejahatan kekerasan di bagian pidato saya yang lain.

Kejahatan lainnya yang cukup unik dan menonjol adalah perampokan yang terjadi tahun 1996. Sejak Januari sampai awal November 1996, menurut data Kepolisian ada 46 kasus perampokan terhadap nasabah di Jakarta. Kerugian meliputi ratusan juta rupiah. Secara kriminologis kejahatan perampokan ini dapat dikaji sebagai aksi yang didasarkan atas cost and benefit analysis, yaitu perampok melihat bahwa keuntungan yang akan diperoleh lebih besar dari "biaya" atau resiko yang dihadapi. Dalam hubungan ini layak disimak ucapan seorang pakar ekonomi, Gary Becker dari Universitas Chicago : Seseorang berani melakukan kejahatan, karena keuntungan yang diharapkan melebihi keuntungan yang diperoleh melalui waktu dan sumber daya dalam bidang profesi yang lain.

Tak kurang menarik untuk dikaji adalah gangguan Kamtibmas berupa "kenakalan remaja" yang terjadi tahun 1996 dan 1997. Kapolda Metro Jaya (waktu itu dijabat oleh Mayor Jenderal Drs. Hamami Nata) mengungkapkan selama tahun 1996 sebanyak 1685 pelajar ditahan petugas karena terlibat perkelahian massal.

Korban yang jatuh akibat tawuran : 14 tewas, 23 warga umum luka dan 8 polisi luka. Perkelahian pelajar dikatakan Kapolda sangat merusak, karena merusak fasilitas umum.

Bus PPD yang rusak akibat tawuran 541 kendaraan, kendaraan pribadi 17 buah. Penelitian tentang gejala perkelahian massal pelajar telah dilakukan, namun hasil penelitian belum memberikan pemahaman yang komprehensif. Kelemahan dalam penelitian tersebut adalah menempatkan unit analisis pada seting individu pelajar. Seharusnya gejala perkelahian massal pelajar antar sekolah diteliti dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dalam seting kolektif. Dengan menggunakan kerangka teori tingkah laku kolektif (Collective behavior) penelitian akan memperoleh hasil yang lebih akurat dan memuaskan. (Mustafa, 1998).

Hadirin yang terhormat,

Data di atas yang terjadi tahun 1996 tentulah tidak berkaitan langsung dengan krisis ekonomi dewasa ini. Terlebih-lebih krisis ekonomi baru terjadi kurang lebih 9 bulan terakhir ini. Dalam hubungan ini sering kali timbul pertanyaan dari berbagai kalangan, baik kaum awam dan terpelajar, apakah peningkatan gangguan Kamtibmas yang terjadi akhir-akhir ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda negeri kita ? Bukankah fenomena pencurian dan perampokan serta pembunuhan terasa meningkat baik secara kuantitatif dan kualitatif

taf setelah krisis ekonomi terjadi ? Bukankah gelombang PHK akibat krisis moneter yang berkepanjangan turut memberikan andil dalam melahirkan pelaku kejahatan ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut pada hakekatnya layak dipahami dan disimak oleh para ahli khususnya para sosiolog dan kriminolog, serta pakar lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut pertama-tama perlu disadari bahwa secara kriminologis tidak dikenal faktor penyebab tunggal dari meningkatnya kriminalitas. Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan, dan struktur masyarakat, serta perubahan nilai sosial dan budaya, ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas maupun modus operandi kejahatan kekerasan (Sahetapy, 1983). Tak dapat diabaikan pula lemahnya penegakan hukum, praktek kolusi, korupsi, nepotisme, sedikit banyak memberikan kontribusi dalam proses terjadinya kejahatan. Di lain pihak, dalam kaitannya dengan krisis ekonomi memang terdapat teori-teori yang mencoba menghubungkan krisis ekonomi dan kejahatan.

Hadirin yang terhormat,

Sebelum saya membahas hubungan krisis ekonomi dengan kejahatan ada baiknya secara sekilas saya menyinggung beberapa teori kejahatan kekerasan pada umumnya. Hal ini perlu diketengahkan, mengingat maraknya pembunuhan sadistik yang

terjadi akhir-akhir ini. Mengapa seseorang melakukan kejahatan kekerasan, khususnya pembunuhan, dapat dijawab oleh beberapa kemungkinan di bawah ini.

Dalam perspektif classical, dicoba dijelaskan bahwa dalam masyarakat terdapat sejumlah orang yang tak merasa takut terhadap sanksi, baik sanksi sosial maupun hukum. Dalam keadaan frustrasi, mereka akan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang bermacam-macam.

Bagi mereka berlaku motto : bunuh dulu, urusan belakangan. Besar kemungkinan perilaku seperti ini akan tumbuh subur dalam persepektif struktur sosial, yaitu ketegangan dan frustrasi yang dialami seseorang yang tinggal atau hidup di daerah kumuh kelas bawah yang menyebabkan seseorang gampang berperilaku menyimpang. Maka nilai-nilai kelas bawah menekankan pada kekerasan (violence) dan kekuatan (power), yang mengakibatkan mereka sering berurusan dengan penegak hukum. Perspektif lainnya mengacu pada proses sosial. Di dalam masyarakat terdapat sejumlah orang yang tak mempunyai kesempatan menikmati institusi konvensional, seperti sekolah, pekerjaan, dan keluarga. Mereka pada umumnya bereaksi keras terhadap tekanan hidup sehari-hari. Termasuk ke dalam ini adalah orang-orang yang tak memiliki kepandaian atau keterampilan seperti dimiliki orang lain. Dalam

mengekspresikan dirinya secara verbal, mereka berusaha menonjolkan dirinya agar dihormati orang lain, dan cara-cara yang ditempuh untuk mengejar penghargaan tersebut dapat menjurus pada ancaman fisik dan kekerasan. Ini termasuk perspektif psychological behaviorist, yang melihat tindakan kekerasan mungkin meningkatkan derajat/tingkat penggerak agresif.

Perspektif lain adalah pendekatan kognitif (cognitive), yang melihat perkembangan moral beberapa orang yang tak berkembang sampai batas (titik) tertentu di mana mereka dapat memahami akibat dari tindakan mereka. Pembunuh jenis ini tak pernah berpikir dua kali sebelum membunuh korbannya.

Dalam kaitannya dengan kehormatan, ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang menganggap bertindak dengan kekerasan sebagai bentuk kelakuan yang dihargai. Ini tercermin dalam teori subkultur kekerasan (subculture of violence), yang melihat bahwa makin kuat seseorang berintegrasi dengan subkultur itu, makin ia menerima aturan-aturan bertingkah laku yang dianut. Dan ia pun akan menyesuaikan kelakuannya dengan aturan bertingkah laku demikian. Dalam banyak kejadian, orang segera mengambil senjata guna melindungi dirinya dari orang lain.

Memiliki semacam badik atau senjata lain dipandang sebagai pertanda keterarahannya kepada sifat

agresif itu. Orang senantiasa waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan dari orang lain. Dan jika memang terjadi, dia sendiri pun bersedia ambil bagian dalam tindakan kekerasan tersebut. Ini tercermin dalam peristiwa pembunuhan terhadap seorang perwira Polisi beberapa tahun yang lalu.

Perspektif lain yang perlu dicermati adalah teori psikoanalisis (psychoanalytic). Tak terpecahkannya konflik yang dihasilkan oleh trauma sejak masa kanak-kanak mengakibatkan ketidakteraturan kepribadian (mentaly disorder) dan tingkah laku agresif kepada seseorang. Berbicara perilaku agresif tak bisa dilepaskan dari teori Freud yang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia mempunyai dua insting dasar, yaitu insting seksual (libido) dan insting agresif atau disebutnya pula sebagai insting kematian (death instinct). Insting seksual atau libido adalah insting yang mendorong manusia untuk mempertahankan hidup, mempertahankan jenis, atau melanjutkan keturunannya. Di lain pihak, insting agresif adalah insting yang mendorong manusia untuk menghancurkan manusia lain.

Tingkah laku agresif tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tingkah laku agresif yang mengandung kebencian (hostile) dan tingkah laku agresif yang memberikan kepuasan (reinforcement) tertentu. Tingkah laku hostile ditandai oleh kepuasan yang

diperoleh karena lawan menderita, luka atau sakit. Tingkah laku yang memberikan kepuasan (reinforcement) ditandai oleh kepuasan yang diperoleh karena lawan gagal mencapai objek yang diinginkannya. Demikian beberapa teori tentang kemungkinan yang melatarbelakangi kasus-kasus pembunuhan di sekitar kita.

Hadirin yang terhormat,

Setelah menguraikan beberapa faktor penyebab kejahatan kekerasan pada umumnya, perkenankanlah saya menginventarisir beberapa teori krisis ekonomi dan kejahatan.

Penelitian tentang hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis kejahatan tertentu telah lama diselidiki oleh para ahli kriminologi sekitar akhir abad ke-19. (Lihat Von Mayr, dikutip dalam Mannheim, 1965, Bonger, 1916, Thomas, 1925, dan Radzinowics, 1925). Von Mayr membuktikan adanya hubungan pencurian dengan fluktuasi harga gandum. Sedangkan W.A. Bonger pernah membahas hubungan antara kemiskinan, pengangguran dan kejahatan pada umumnya. Teori klasik dari Bonger pada hakekatnya memberikan inspirasi pada pakar kriminologi modern yang mengembangkan studi ekologi tentang kejahatan. Shaw and Mc Kay (lihat Gordon, 1967) yang meneliti secara intensif tingginya tingkat kejahatan dalam komunitas miskin, mendapat dukungan empiris dari pakar-

pakar lain. Pakar-pakar tersebut (Bullock 1955, Bensing and Schroeder 1966, Beasley and Antunes 1974, Mladenka and Aill 1976) yang melakukan studi di Houston Amerika Serikat melaporkan tingginya korelasi kejahatan kekerasan dengan kemiskinan. Wilayah-wilayah di Houston tersebut mencerminkan tingginya kejahatan kekerasan yang ditandai oleh kepadatan penduduk dan banyaknya penduduk kulit hitam. Efek dari tingkat kemiskinan absolut dan ketidakseimbangan income pada saat kemakmuran ekonomi yang mengakibatkan pembunuhan, juga dipelajari. Judith dan Peter Blau (1982) menemukan bahwa wilayah metropolitan yang mencerminkan perbedaan income yang mencolok menunjukkan tingginya tingkat pembunuhan. Di lain pihak pada wilayah lain dilaporkan tingginya tingkat pembunuhan pada komunitas dengan tingkat kemiskinan absolut. Penemuan ini juga didasarkan pada teori perbedaan struktur yaitu perbedaan sosial ekonomi akan menjadi sumber kejahatan (Schwartz, 1984). Dasar teori ini menekankan bahwa pada saat perbedaan itu besar, maka orang akan menjadi frustrasi dan akan meningkatkan perasaan dirampas haknya. Perasaan tersebut akan membuat individu akan menilai kedudukan mereka dengan orang lain, bahwa kedudukan orang lain lebih baik dari mereka.

Studi ekologi kejahatan ini secara lebih rinci diuraikan oleh James F. Short, Jr. (1997) yang mengungg-

kapkan peningkatan kejahatan kekerasan tidak saja terdapat pada komunitas miskin, namun juga pada fenomena dinamis, seperti meningkatnya konsentrasi kemiskinan secara geografis di wilayah perkotaan, ketimpangan antara si miskin dan si kaya, dan kemungkinan munculnya budaya kekerasan pada komunitas miskin.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan penelitian yang dilakukan oleh Walter B. Miller lebih dari 20 tahun yang lalu di New York dan sekitarnya mengenai lower class culture. Walter B. Miller menyebutkan sejumlah parameter yang mencerminkan eratnya kejahatan dengan budaya kelas bawah. Miller antara lain menyebutkan bahwa budaya tersebut adalah gemar mencari gara-gara (trouble), tahan digebuki dan nekad (toughness), mengutamakan kelihaihan dan kelicikan (smartness), serta percaya pada nasib ditakdirkan sebagai penjahat (fate) dan sebagainya. Budaya kelas bawah yang dikemukakan oleh Miller tersebut sedikit banyak terlihat dalam gejala premanisme di Indonesia.

Hadirin yang terhormat,

Bicara mengenai krisis ekonomi dan kejahatan perlu dikemukakan laporan lokakarya yang diadakan bulan Juni 1974 oleh United Nations Social Defense Research (UNISDRI) yang membahas seperangkat hipotesis mengenai korelasi antara krisis ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Juga

tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan menangani melalui tindakan-tindakan pengamanan sosial (Sukanto 1985). Adapun beberapa kesimpulan yang diperoleh dari diskusi-diskusi itu antara lain adalah : Pertumbuhan ekonomi berkorelasi secara positif - walaupun berbeda-beda dengan angka laju yang tinggi dari beberapa besar katagori kejahatan yang dilaporkan.

Sementara melalui pengukuran indikator-indikator ekonomi pada tingkat Mikro yang tercermin dalam pengangguran, kelesuan bisnis, serta hilangnya daya beli, dapat ditandai adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan. Adapun tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenis masyarakatnya dan waktu.

Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni :

1. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri illegal.
2. Terdapatnya bentuk-bentuk "inovasi" sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosiostruktural untuk mencapai

nya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak yang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi "innovator" potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.

3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah.

4. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.

5. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan delinkuen.

6. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya, cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula, dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukan suatu kejahatan. (Sukanto, 1985 : 73).

Hadirin yang terhormat,

Seperti disebutkan di muka pada beberapa kepribadian tertentu, krisis

ekonomi akan menimbulkan frustrasi. Adanya hambatan dan ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan pada gilirannya menjelma menjadi bentuk-bentuk perilaku yang agresif.

Sejalan dengan teori di atas saya ingin mengutip teori Henry dan Short (1954) yang berpendapat bahwa, orang-orang yang mengalami frustrasi mudah sekali melakukan tindakan kekerasan. Arah tindak kekerasan tersebut bisa tertuju ke luar; berupa pembunuhan, atau ke dalam; bunuh diri. Hal ini merupakan proses yang bisa dijelaskan dengan teori pengendalian eksternal. (External restrain theory).

Pengendalian eksternal adalah suatu derajat atau tingkat sampai di mana seseorang masih memerlukan kompromi dengan harapan-harapan atau kebutuhan orang lain. Bila keperluan untuk berkompromi itu tinggi, berarti pengendalian eksternalnya kuat. Bila pengendalian eksternal kuat, seseorang akan meningkatkan kekecewaannya kepada hal-hal yang berasal dari luar dan tindak kekerasannya akan diekspresikan ke arah luar seperti misalnya pembunuhan. Sebaliknya apabila pengendalian eksternalnya lemah, rasa kekecewaan seseorang akan dihubungkan dengan ketidakberdayaan pribadi. Di sini tindakan seseorang akan mengarah ke dalam; bunuh diri.

Menurut Henry dan Short tingkat pengendalian eksternal ditentukan

oleh kedudukan sosial seseorang. Orang yang tidak memiliki kekayaan, kekuasaan, kecakapan atau status sosial ekonomi yang rendah lebih terdesak oleh pengaruh dari luar. Studi Henry dan Short di Amerika Serikat mencoba membedakan tingkat pembunuhan pada pria dan wanita, orang Negro serta orang Kulit Putih.

Yang menarik dari teori Short adalah bahwa tingkat kejahatan pembunuhan berubah pada kelas menengah ke bawah sesuai dengan fluktuasi ekonomi secara umum. Pada waktu terjadi resesi ekonomi, masyarakat menengah kehilangan status sosial dan otoritasnya dibanding masyarakat strata bawah. Kehilangan status sosial tersebut menjadikan mereka frustrasi. Ini menunjukkan bahwa kehilangan status sosial dan otoritas pada pengendalian eksternal lebih disebabkan oleh adanya resesi ekonomi daripada ketidakberdayaan pribadi. Sebagai akibatnya, pembunuhan di kalangan menengah akan naik selama resesi ekonomi. Sebaliknya di kalangan menengah strata bawah pembunuhan akan berkurang, karena berkurangnya rasa frustrasi. Dapat disimpulkan bahwa pembunuhan di kalangan masyarakat bawah akan turun selama masa kemunduran ekonomi.

Di lain pihak kemakmuran ekonomi berakibat naiknya angka pembunuhan di kalangan strata bawah. Sedangkan di kalangan menengah akan turun. Pola ini menunjukkan bah-

wa naik turunnya rasa frustrasi disebabkan oleh pengendalian eksternal dan kemakmuran ekonomi. Kalangan menengah yang dibekali oleh pendidikan, keahlian serta kekayaan akan memperoleh hal yang menguntungkan dimasa kemakmuran ekonomi. Ini tidak terjadi di kalangan masyarakat bawah sehingga kondisi mereka akan menjadi lebih buruk selama kemakmuran ekonomi. Kegagalan dimasa ekonomi makmur akan menciptakan tingginya rasa frustrasi di kalangan strata bawah, sehingga kemarahan akan langsung diungkapkan keluar.

Hadirin yang terhormat,

Teori pengendalian eksternal belum diuji kebenarannya di Indonesia. Namun cukup banyak kasus kejahatan pembunuhan terjadi dilakukan oleh pengganggu yang frustrasi, khususnya dari kalangan strata bawah. Menurut data kepolisian sejak tahun 80-an sekitar 70% pelaku kejahatan kekerasan adalah pengganggu. Belum jelas betul apakah pelaku kejahatan kekerasan tahun 90-an ke atas juga datang dari kelompok pengganggu.

Sementara peristiwa bunuh diri sebagai akibat krisis ekonomi belakangan ini juga kerap terjadi. Belum lama ini seorang ibu rumah tangga bernama Sarmini yang mengalami frustrasi melakukan bunuh diri karena sang suami kena PHK dan menganggur. (Gatra no. 10 th IV tahun 1998). Kasus lain terjadi beberapa waktu

yang lalu seorang pemuda pegawai swalayan di Bekasi juga melakukan bunuh diri karena terancam PHK. Yang unik dalam kasus ini adalah bahwa laki-laki tersebut membunuh majikannya sebelum membunuh dirinya sendiri. Kasus yang juga menarik adalah kasus Karimin Susanto, seorang kepala keluarga di kota Kendal. Penderita asma ini putus asa melakukan bunuh diri karena tak sanggup beli obat. (Kompas, 26 Feb 1998). Kasus yang menyedihkan adalah kasus seorang ibu yang mencoba membunuh diri dan sebelumnya membunuh bayinya berumur 6 bulan menggunakan Baygon. Latar belakang bunuh diri dan membunuh, karena sang ibu tidak sanggup membeli susu untuk bayinya. (Media Indonesia, 29 April 1998). Sementara itu pasangan suami istri, Iwan (50) dan Loei Tjoi Hoeng (52) hari Minggu (17 Mei 1998) ditemukan tewas di rumahnya, Kompleks Citra Garden I Kali Deres Jakarta Barat. Keduanya diduga tewas bunuh diri dengan cairan pembersih Prosect. Tetangga korban yang ditemukan Kompas, mengungkapkan sudah beberapa hari Loei Tjoi Hoeng mengaku stress, karena telah di PHK dari kantornya. (Kompas, 18 Mei 1998). Kasus bunuh diri setelah krisis moneter di Indonesia memang cukup tinggi. Menurut data Kepolisian Jakarta saja mulai bulan Januari sampai dengan Maret 1998 tercatat tidak kurang dari 25 kasus bunuh diri. Tahun 1997 terjadi 63 kasus bunuh diri. Belum jelas apakah sebagian

peristiwa bunuh diri juga disebabkan oleh krisis moneter. Yang jelas ada data yang cukup merisaukan yaitu terjadinya peningkatan kasus bunuh diri akibat depresi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sebelum krisis moneter (Januari - Juni 1997) ditemukan sebanyak 23 kasus. Sementara setelah krisis moneter dari September 1997 - Maret 1998 ditemukan 48 kasus. Menurut psikiater dr. Teddy Hidayat kemungkinan besar hal itu sebagai dampak krisis moneter dan ekonomi, antara lain banyaknya PHK. Kebanyakan pasien menurut dr. Teddy berstatus ekonomi menengah ke bawah. (Kompas, 27 April 1998).

Data-data sumir tersebut belum tentu menunjang kebenaran teori pengendalian eksternal yang umumnya berlaku di Amerika Serikat. Secara akademik diperlukan suatu penelitian yang valid dan representatif.

Hadirin yang terhormat,

Seperti disebutkan di muka, sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya, cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula, dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukan suatu kejahatan.

Bicara angka pengangguran, angka pengangguran terbuka di Indonesia sudah mencapai 13,5 juta orang (Seminar Buruh Wanita, Jogja 28

April 1998). Menurut Rozy Munir Ketua Komisi Pengupahan DKI, tingkat pengangguran makin menyedihkan lagi di desa-desa mencapai 44-45 persen. Akibatnya penduduk usia 10-16 tahun banyak lari ke kota untuk mencari penghidupan. Sebagian dari remaja ini memperoleh pekerjaan, sebagian lagi tetap menganggur. Mengenai kaitan umur, angka kriminalitas, dan angka pengangguran perlu dicatat studi Glaser dan Rice (1974) yang menonjolkan usia 18 tahun sampai dengan 35 tahun sebagai umur rawan kejahatan dibanding dengan pria dewasa atau usia lanjut. Di samping itu menurut Glaser, selain variabel umur maka terdapat variabel lainnya yang turut menentukan tingginya angka kejahatan akibat pengangguran seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan sebelumnya dan sebagainya.

Sejalan dengan sinyalemen Rozy Munir, Prof. Dr. Ian C. Breman pakar sosiologi dari Universitas Amsterdam Belanda mengatakan bahwa di Indonesia sekarang sedang berlangsung proses kemiskinan yang luar biasa di desa-desa. Ini semua akibat pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor formal dan konstruksi yang kemudian mendorong arus mudik pengangguran. Di desa sendiri aset yang bisa didistribusikan sudah sangat terbatas. Dengan demikian kehadiran para penganggur itu menambah beban sosial ekonomi desa. Celakanya saat ini harga berbagai kebutuhan pokok di pedesaan jauh lebih mahal dibanding

perkotaan, ini akibat mata rantai pemasaran yang runyam dan kebijakan pangan pemerintah yang lebih berorientasi melindungi kebutuhan penduduk kota. (Kompas, 17 April 1998).

Ian C. Breman melihat bahwa dampak krisis moneter lebih parah di pedesaan dan mensinyalir krisis ini sebagai jauh lebih gawat dibanding resesi dunia tahun 1930-an. Breman meramalkan sekitar bulan Juni-Juli mendatang dampak kurs akan sangat kritis karena berkaitan dengan tahun ajaran baru. Banyak siswa terpaksa putus sekolah akibat orang tuanya tidak sanggup membiayai pendidikan termasuk membeli buku, seragam sekolah dan transpor. Selain itu terdengar pula berita yang memprihatinkan dunia pendidikan, yaitu sedikitnya ada 302.000 mahasiswa PTN/PTS dari keluarga miskin terancam drop out, akibat tidak mampu membayar kuliah. (Terbit, 25 April 1998).

Hadirin yang terhormat,

Sebagai kriminolog saya merasa prihatin dengan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Di antara pakar kriminologi sebenarnya masih terdapat perdebatan mengenai adanya hubungan kausalitas kejahatan dengan pengangguran.

Namun demikian banyak ahli yang percaya bahwa pengangguran menjadi faktor pendorong timbulnya kejahatan.

Pengangguran membuat hidup semakin sulit, dan seperti telah disebutkan di muka dapat menimbulkan perasaan frustrasi.

Sejalan dengan ini Coser (1963) menyatakan bahwa ketimpangan sosial dapat mendorong tumbuh subur nya perasaan frustrasi, yang pada gilirannya akan melahirkan tindak kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk pembunuhan.

Sementara itu Box (1987) me-nyinggung dua teori kriminologi yang memiliki sisi pandang yang berbeda. Pertama, Teori Anomie yang sedikit banyak telah disinggung di muka. Menurut teori ini adanya pemenuhan kebutuhan yang tersumbat (thwarted ambition) dan tidak tersedianya sa-rana yang cukup dapat melahirkan perasaan dipinggirkan (relative dep-ri-vation).

Berdasarkan argumen ini adalah wajar apabila krisis ekonomi dengan kejahatan mempunyai hubungan yang bersifat kausalistik. Menurut para pendukung teori ini, di manapun di dunia ini, bila keberhasilan hidup melalui cara-cara yang sah telah ter-tutup, maka motivasi untuk melaku-kan kejahatan akan meningkat. Dan karena dalam masyarakat terdapat anggapan, bahwa untuk mencapai ke-berhasilan orang harus bekerja dan menjadi pekerja, maka para pengang-gur akan termotivasi melakukan ke-jahatan terutama dimasa krisis eko-nomi di mana pengangguran tumbuh subur.

Yang kedua teori kontrol. Teori ini menyatakan bahwa orang melaku-kan kejahatan karena yang bersang-kutan kurang memiliki komitmen yang kuat terhadap masa depan dan kurang menghargai orang lain. Me-nurut teori ini pengangguran akan memperlemah tali hubungan keluarga yang membuahkan pemukulan ter-hadap istri dan penyiksaan terhadap anak (Strauss, 1980), serta perceraian (Thornes and Callard, 1979).

Menurut Box (1987), kejahatan terhadap harta benda (property crime) nampaknya merupakan respons yang rasional atas pengangguran dan ke-timpangan pendapatan. Pendapat ini diperkuat oleh Fiels (1990) yaitu kejahatan terhadap harta benda akan meningkat, manakala kondisi ekonomi sedang lesu, dan akan menurun apabila situasi ekonomi membaik. Selanjut-nya kekosongan lapangan pekerjaan juga akan menimbulkan demoralisasi dalam masyarakat dan deligitimasi atas lembaga negara yang sah, yang pada gilirannya dapat melahirkan kerusuhan sosial.

Dua pernyataan terakhir dari Box ini menurut hemat saya mendukung hipotesis meningkatnya kejahatan di Indonesia diakibatkan oleh faktor pengangguran dan kemiskinan. Data crime index seluruh Indonesia me-nunjukkan bahwa terdapat kenaikan dalam jenis kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian dengan pem-beratan, pencurian kendaraan bermot-or dan pencurian dengan kekerasan.

Meskipun belum diadakan penelitian resmi, hampir dapat dipastikan bahwa para pelaku kejahatan di atas berasal dari golongan strata bawah yang sebagian besar adalah penganggur.

Sementara timbulnya demoralisasi dalam masyarakat dan deligitimasi atas lembaga negara yang sah dan timbulnya kerusuhan sosial, tercermin dalam peristiwa 14 Mei yang lalu.

Terlepas dari faktor lain yang melatar belakangi, para pelaku kerusuhan sebagian besar adalah juga para penganggur atau golongan strata bawah.

Hadirin yang terhormat,

Mengakhiri pidato saya, sejujurnya saya mengalami kesulitan di dalam mencari formula untuk menanggulangi timbulnya kriminalitas sebagai akibat krisis moneter dan ekonomi. Hal ini disebabkan krisis tersebut sampai sekarang masih berlangsung, dan di lain pihak proses pengangguran dan kemiskinan nampaknya masih akan berlanjut terus.

Di samping itu, seperti disebutkan di muka, kriminologi tidak mengenal faktor penyebab tunggal dari meningkatnya kriminalitas, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab.

Sementara itu perlu ditegaskan bahwa memberantas kejahatan sampai tuntas adalah mustahil, sesuai pendapat Durkheim (1966) bahwa kejahatan dalam batas-batas tertentu

adalah normal dan fungsional. Usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi dan menanggulangi kejahatan baik dengan cara pendekatan sosial maupun situasional. Saya merasa yakin bahwa teknik tersebut sudah dilakukan oleh Kepolisian RI dan tidak perlu saya jabarkan di dalam pidato ini.

Untuk menutup pidato saya, tidak ada salahnya saya menyinggung teori klasik dari Walter C. Reckless yang menekankan beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil, antara lain : sistem organisasi kepolisian yang baik, pelaksanaan peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa dan partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Harus diakui bahwa kesemua itu belum dicapai secara maksimal. Dalam rangka menyusun organisasi kepolisian yang baik, seringkali kita terbentur pada dana, personil, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kita belum melaksanakan peradilan yang efektif terbukti dengan adanya berbagai ketimpangan dalam sistem peradilan pidana kita.

Sementara hukum yang berwibawa masih menjadi angan-angan belaka. Yang sering terjadi adalah kerusakan dan ketidak pastian hukum serta kehampaan hukum. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan juga masih kurang. Seringkali masyarakat

menutup diri atau acuh tak acuh terhadap peristiwa kejahatan yang dialami orang lain.

Saya berharap bahwa reformasi yang dilakukan pemerintah, yang menyangkut bidang ekonomi, politik, hukum dan terutama mental sedikit banyak dapat mengurangi tingkat kriminalitas akibat krisis ekonomi yang terjadi dewasa ini.

Insyallah Tuhan akan melindungi usaha yang mulia ini.

Sekian. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tambahan

Hadirin yang terhormat,

Di bagian awal orasi ilmiah ini, saya menyatakan bahwa pengertian gangguan kamtibmas cukup luas, dan saya mencoba membatasi bentuk-bentuknya pada beberapa kasus kejahatan kekerasan seperti pembunuhan, bunuh diri, dan kejahatan terhadap harta benda (property crime).

Di dalam sisipan pidato ini, saya mencoba mengangkat jenis gangguan kamtibmas lainnya, yang menurut laporan situasi kamtibmas MABES POLRI (1998) termasuk jenis kualitas peristiwa yang menonjol, yaitu pengrusakan, pembakaran dan kerusuhan.

Puncak dari peristiwa jenis gangguan kamtibmas tersebut adalah kerusuhan tanggal 14 Mei lalu, yang memakan korban ratusan jiwa manusia dan harta yang bernilai ratusan milyar rupiah atau lebih.

Secara teoritis, sebenarnya sangat sedikit ditemukan bukti bahwa tingkah laku itu direncanakan dan direkayasa sebelumnya.

Kebanyakan kerusuhan merupakan ledakan spontan dari kelompok yang kecewa, yang memberikan reaksi terhadap peristiwa dan isu yang muncul.

Menurut Horton dan Junt (1991) kerusuhan mencakup pameran kekuatan, penyerangan terhadap kelompok yang tidak disenangi, perampasan dan pengrusakan harta benda terutama milik kelompok yang dibenci.

Setiap kerusuhan memberikan dukungan kerumunan dan kebebasan dari tanggung jawab moral, dengan demikian orang dapat menyalurkan dorongan hati.

Secara psikologis orang yang berada dalam kerumunan merasa bahwa tidak ada orang lain yang memperhatikan dan mengenalnya. Dan dalam kerumunan orang banyak, orang menjadi gampang meniru perbuatan orang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan anggota kerumunan lepas kendali, sehingga memungkinkan seseorang melakukan tindakan agresif dan destruktif.

Dari sinilah lahir tingkah laku amoral dari manusia, yang bukan saja mampu melakukan penjarahan dan pembakaran seenaknya, namun juga perbuatan keji lainnya seperti perkosaan terhadap kelompok yang dibenci.

Terjadi proses penurunan intelektual dan moral, serta hilangnya rasionalitas dari para individu yang ada dalam kerumunan tadi.

Hadirin yang terhormat,

Ikut sertanya kanak-kanak dan remaja guna turut merusak dan membakar, menjadikan kita perlu pula mengkhawatirkan perkembangan mental mereka untuk selanjutnya. Khususnya bila mereka tidak sempat tersentuh tangan-tangan hukum ataupun luput dari pelabelan yang umumnya segera dilakukan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan penyimpangan perilaku.

Khusus berbicara mengenai kerusuhan, selain kerusuhan yang bermotif ekonomi, maka perlu disadari bahwa jauh lebih banyak lagi kerusuhan yang bercikal-bakal masalah rasial, agama atau politik. Kerusuhan dengan motif non-ekonomi tersebut tentu saja tidak perlu terjadi pada saat ekonomi sedang krisis seperti dewasa ini. Bahkan, seperti terlihat pada tanggal 14 Mei 1998 di Jakarta, kerusuhan tersebut demikian absurdnya mengingat semakin memperburuk keadaan ekonomi yang telah payah ini.

Menurut saya, seandainya benar bila kerusuhan tersebut digerakkan oleh kelompok yang terorganisir, maka yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut tentulah jauh lebih penting serta strategis dibanding hancurnya ribuan bangunan, tewasnya ra-

tusan orang serta hangusnya ratusan kendaraan bermotor. Bila dicari pदानannya dalam kriminologi, maka tindakan kelompok terorganisir tersebut tentulah kejahatan maha besar terhadap kemanusiaan (crime against humanity).

Hadirin yang terhormat,

Di bagian akhir pidato saya, saya menekankan perlunya reformasi di segala bidang termasuk hukum dan mental manusianya.

Demikianlah bahwa masalah kejahatan dan penanggulangannya akan semakin mengkhawatirkan apabila tidak dilakukan reformasi secara segera dan total terhadap sistem peradilan pidana. Saya pribadi berpendapat sistem peradilan pidana di Indonesia adalah salah satu lokasi dari beberapa lokasi di mana berlangsung KKN (korupsi-kolusi-nepotisme) dari tingkat yang lumayan parah. Tidak ada satupun komponen peradilan pidana, mulai dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan, yang bisa mengklaim dirinya sebagai paling bersih dari pada yang lain.

Amat saya harapkan, Polri bersedia melakukan koreksi terhadap perilaku personelnnya, khususnya yang cenderung melihat KKN sebagai "minyak pelumas" bagi bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut. Jika tidak, maka amat boleh jadi suatu ketika kita melihat ada penjahat yang bebas berkeliaran telah menyuap Polisi.

Sikap bahwa kita sedang berada dalam situasi krisis (sence of urgency) serta tingkat kesediaan kita untuk melakukan tanggung-gugat (level of accountability) atas keputusan-keputusan kita sendiri, harus ditingkatkan guna menghadapi peningkatan kriminalitas akibat krisis ekonomi ini. Dalam rangka itulah, saya menyambut baik keinginan sebagian masyarakat, serta mungkin pula keinginan Polri sendiri, memisahkan diri dari ABRI dan menjadi institusi penegak hukum yang independen.

Dilihat dari sudut sence of urgency tadi, maka keberadaan Polisi di luar ABRI, akan menjadikan Polri semakin lincah bergerak dalam melakukan ataupun tidak melakukan kriminalisasi atas kejahatan atau perilaku penyimpangan tertentu di masyarakat. Walaupun demikian perlu pula disadari bahwa akan muncul tantangan-tantangan baru ketika Polri bukan lagi militer seperti sekarang ini.

Sedang dilihat dari sudut level of accountability, maka Polri yang berada di luar ABRI akan tampil sebagai institusi yang memiliki peran legal-formal yang menonjol dan sangat menentukan dalam hal penegakan hukum. Maka, tak ada institusi lain yang bisa mempengaruhi Polri guna memulai ataupun menghentikan penyelidikan dan penyidikan atas sesuatu kasus kejahatan. Sebaliknya, Polri juga tidak bisa lagi mengelak dari tanggungjawab dan harus mem-

pertaruhkannya sendiri, apabila ada praktek penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung salah kaprah dan menyimpang seperti pernah beberapa kali terjadi selama ini.

Sekian terima kasih.

Tb. Ronny Nitibaskara

DAFTAR BACAAN

- Blau, Judith R. and Peter M. Blau. The Cost of Inequality : Metropolitan Structure and Violent Crime "American Sociological Review 47 (1982 : 114 - 129)
- Blau, Peter M. and Joseph E. Schwartz, Crosscutting Social Circles, Orlando, FL, Academic Press 1984.
- Box, Steven, Recesion, Crime and Punishment (Basingstoke, Mac Millan), 1987.
- Durkheim. E. The Rules of Sociological Method, Edisi ke-8, diterjemahkan oleh Sarah A. Solovay dan John H. Mueller. Disunting oleh George E.G. Cantlin, New York : The Free Press, 1966.
- Field, Simon, Trends in Crime and their Interpretation. Home Office Research Study no. 119, 1990.
- Gordon, Robert A, "Issues in Ecological Study of Delinquency "American Sociological", Review 32, no. 6 : 927-944, 1967.
- Henry, Andrew F. and James Short, Suicide and homicide : Some economic, Sociological and Psy-

- Psychological Aspects of Aggression, New York : Free Press 1954.
- Miller B. Walter, Lower Class as a Generating Millieu of Gang Delinquency di dalam Delos H Kelly, Deviant Behavior, Reading in the Sociology of deviance, St. Martin's Press, New York 1979.
- Sahetapy JE, Kejahatan Kekerasan, Surabaya, Sinar Wijaya Cetakan I, 1983.
- Soekanto, Soeryono, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta, Ghalia, Indonesia 1986.
- Short, Jr. James F. Poverty, Ethnicity, and violent crime. Published in 1997, in the Unites States of America by Westview Press Central Avenue, Boulder, Colorado 80301-2877.
- Straus, MA. "Social Stress and Marital Violence in a National Sample of American Families" pp 229-250 in Forensic Psychology and Psychiatry, edited by F. Wright et.al New York Academy of Science, 1980.
- Forum Keadilan, 1988
- GATRA no. 18 th IV 1998
- Kompas, 26 Februari 1998
- Kompas, 1 Mei 1998
- Media Indonesia, 19 April 1998
- Terbit, 25 April 1998
- Data Gangguan Kamtibmas Polri 1998.
- Seminar Buruh Wanita, Jogja 28 April 1998

BAKTI-DHARMA-WASPADA

KEPOLISIAN